

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi saja, tetapi juga faktor manusia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan itu sendiri memiliki pengertian yang luas, yaitu sebuah tahapan multi dimensi yang mencakup adanya perubahan yang besar mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi, pola sosial, ketimpangan, pengangguran serta pengurangan kemiskinan (Putri et al., 2022). Sedangkan disitasi oleh Octasari (2016) pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini juga sebagai acuan suatu daerah untuk dapat dikatakan baik dari segi perekonomiannya, infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia dan peran pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang dampaknya dapat memperluas dan meningkatkan standar hidup, lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan dan faktor pengikut lainnya seperti ekonomi dan sosial.

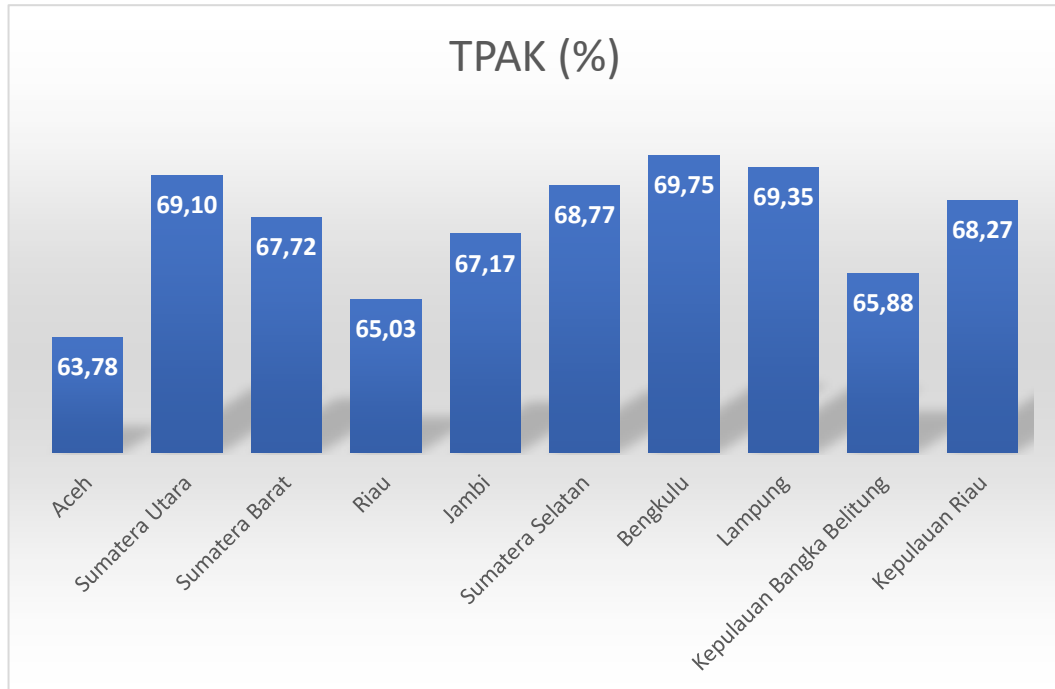
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam waktu jangka panjang. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang lajunya semakin cepat. Untuk negara yang berkembang seperti Indonesia yang di mana pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung lebih cepat sehingga melebihi pertumbuhan perkapita (Rukmana, 2019)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Bersumber dari hasil SUSENAS pada tahun 2021 Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 271,58 juta jiwa dengan jumlah tersebut terdiri dari 136,34 juta jiwa laki-laki dan 135,24 juta jiwa perempuan. Ketika laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja dan akan menyebabkan persediaan tenaga kerja juga harus banyak. Jika kesempatan kerja yang tersedia tidak mencukupi sedangkan jumlah angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah hal ini hanya akan menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak yang pada akhirnya akan menjadi beban pembangunan bagi negara.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara berkembang salah satunya Negara Indonesia. Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti pertambahan lapangan pekerjaan selalu menjadi pemicu menjamainya pengangguran. Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting. Pada kenyataannya saat ini Negara Indonesia sangat membutuhkan generasi penerus yang berkualitas berfungsi sebagai tenaga pembangunan Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting dari sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, air dan sebagainya karena manusialah yang menggerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang.

Salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi yaitu dengan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah tertentu. Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri merupakan penduduk usia kerja yang ikut serta pada pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada gambar 1.1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2021 tertinggi ditempati oleh Provinsi Bengkulu sebesar 69.75 persen. Sedangkan, lima provinsi yang memiliki angka tingkat partisipasi kerja terendah yaitu berada di Sumatera Barat 67.72 persen, Jambi 67.17 persen, Kep. Babel 65.88 persen, Riau 65.03 persen, dan Aceh 63.78 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah menunjukkan bahwa kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja, sehingga akan menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Berikut merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi disajikan dalam bentuk tabel 1.1

**Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	2019	2020	2021
Kerinci	66,26	69,50	70,90
Merangin	68,91	70,17	69,85
Sarolangun	65,20	68,58	64,86
Batang Hari	60,35	67,02	68,81
Muaro Jambi	59,16	61,63	62,78
Tanjab Timur	69,84	74,18	71,22
Tanjab Barat	70,42	74,83	73,89
Tebo	70,17	71,13	70,65
Bungo	63,78	64,89	63,58
Kota Jambi	66,30	64,12	63,12
Sungai Penuh	63,18	65,99	64,92
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>66,09</b>	<b>67,79</b>	<b>67,17</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah TPAK di Provinsi Jambi berfluktuasi selama tiga tahun terakhir dimana Kabupaten yang memiliki nilai rata-rata TPAK tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 73,04 persen dan Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai rata-rata TPAK terendah dengan jumlah 61,19 persen.

Berikut merupakan data kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi disajikan dalam bentuk tabel 1.2

**Tabel 1.2 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi Tahun 2021**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Angkatan Kerja	1.840.594
Bekerja	1.746.840
Pengangguran	93.754
Bukan Angkatan Kerja	899.583
TPAK (%)	67,17
TPT (%)	5,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Tabel 1.2 data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jambi tahun 2021 adalah 1.840.594 jiwa, jumlah penduduk yang bekerja adalah 1.746.840 jiwa. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah sebanyak 899.583 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,17%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 93.754 jiwa.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks, dan pengangguran adalah masalah dari tidak seimbangnya antara (*demand of labor*) dan (*supply of labor*). Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran (Rahyono, 2018)

**Tabel 1.3 Data Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Investasi (Rupiah)		
	2019	2020	2021
Kerinci	1.731.733.600.000	1.161.829.300.000	1.433.384.900.000
Sarolangun	199.949.415.500	263.227.120.000	298.476.320.000
Merangin	10.200.512.500	38.473.420.000	346.184.920.000
Batang Hari	846.586.788.100	522.030.820.000	1.087.638.920.000
Muaro Jambi	257.567.266.500	618.558.040.000	599.102.980.000
Tanjab Barat	458.447.354.500	812.228.260.000	1.188.504.980.000
Tanjab Timur	394.200.414.400	89.692.560.000	317.256.310.000
Bungo	261.287.247.600	167.322.900.000	218.338.900.000
Tebo	409.433.636.300	54.934.820.000	798.613.270.000
Kota Jambi	587.627.195.000	168.560.520.000	653.179.570.000
Sungai Penuh	320.000.000	3.150.000.000	6.038.700.000
Provinsi Jambi	5.157.353.430.400	3.900.007.760.000	5.859.080.850.000

Sumber : DPM-PTSP Provinsi Jambi, 2022

Salah satu pengaruh TPAK dapat dilihat dari investasi pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi investasi di Provinsi Jambi dapat dibedakan dengan melihat keberagaman pola kegiatan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota. Perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi setiap Kabupaten/Kota dapat berpengaruh pada besar kecilnya nilai investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang merupakan perusahaan dalam maupun luar negeri. Misalnya daerah Kabupaten/Kota yang bertumpu pada kegiatan industri pengolahan akan cenderung membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, dibandingkan Kabupaten/Kota dengan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan. Bersumber dari data DPM-PTSP Provinsi Jambi, rata-rata jumlah investasi Provinsi Jambi tahun 2019-2021 berjumlah Rp 4.972.147.346.800. Dapat diketahui Kabupaten dengan rata-rata nilai investasi tertinggi periode 2019-2021 adalah Kabupaten Kerinci dengan nilai rata-rata sebesar Rp 1.442.315.933.333 sedangkan, nilai rata-rata investasi terendah berada di Kota Sungai Penuh sebesar Rp 3.169.700.000. Nilai investasi di Kota Sungai Penuh cenderung kecil diakibatkan posisinya yang merupakan pusat perdagangan, dan jumlah perusahaan yang berada pada sektor perdagangan jumlahnya masih terbatas. Terlihat bahwa perkembangan tingkat pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi menunjukkan

tingkat fluktuasi yang cukup beragam. Kondisi ini diduga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Berdasarkan penelitian Widyapangesti & Soelistyo (2022), menyatakan investasi memiliki dampak positif dan relevan terhadap lapangan kerja di Indonesia. Jika nilai investasi meningkat sebesar 1%, lapangan kerja meningkat sebesar 0,01%.

Selain Investasi, Pertumbuhan Ekonomi juga digunakan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat di suatu Negara pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi, baik secara ekonomi maupun politik, merupakan tujuan pembangunan yang penting dalam menjamin keberhasilan ekonomi jangka panjang suatu bangsa (Florina, 2014).

Berikut merupakan data Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Jambi disajikan dalam bentuk tabel 1.4

**Tabel 1.4 Data Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	PE (Persen)			Gini Ratio (Persen)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kerinci	4,23	3,86	4,16	0,29	0,28	0,28
Sarolangun	4,26	-0,25	6,61	0,27	0,31	0,32
Merangin	4,25	0,83	5,09	0,31	0,32	0,29
Batang Hari	5,07	-0,39	4,74	0,31	0,32	0,31
Muaro Jambi	4,79	0,37	4,08	0,29	0,28	0,32
Tanjab Barat	5,01	-0,60	1,36	0,28	0,28	0,25
Tanjab Timur	4,21	-3,92	0,13	0,29	0,25	0,25
Bungo	4,19	-0,44	5,12	0,33	0,31	0,30
Tebo	4,76	-0,02	4,32	0,26	0,30	0,30
Kota Jambi	4,19	-0,44	5,12	0,33	0,31	0,30
Sungai Penuh	5,01	-0,16	3,67	0,33	0,31	0,31
Provinsi Jambi	4,35	-0,44	3,66	0,32	0,32	0,31

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Di Provinsi Jambi Pertumbuhan Ekonomi tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2021 mengalami tren naik turun. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi covid 19 yaitu sebesar -0,44 persen namun, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 3,66 persen.

Selanjutnya ketimpangan pendapatan juga menjadi pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dimana ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights*. Ketimpangan pendapatan secara umum terjadi karena keadaan geografis dan fluktuasi pada sektor sumberdaya manusia dan ketenagakerjaannya (Akhbar et al., 2018)

Ketimpangan pendapatan diukur dengan *Gini Concentration Ratio* (GRC) atau lazim disebut dengan *Gini Ratio*. Dapat dilihat gini ratio di Provinsi Jambi pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 gini ratio di Provinsi Jambi yaitu sebesar 0,32 persen, pada tahun 2020 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan yaitu nilai tetap sebesar 0,32 persen sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 0,31 persen.

Berdasarkan permasalahan dan fakta yang dipaparkan di latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”** pada penelitian ini peneliti menggunakan 11 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi dengan rentang waktu yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan pendapatan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menganalisis Perkembangan Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai bahan publikasi dan petunjuk bagi para peneliti di bidang yang sama guna bisa dikembangkan seterusnya di masa mendatang, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ekonomi pembangunan terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk pembangunan ekonomi.

### **2. Manfaat Praktis**

Studi ini diharapkan mampu menarik minat pemerintah daerah dan berkontribusi pada peraturan dan pengambilan keputusan terkait serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan.